

KONSEP DASAR KEBERADAAN MASYARAKAT DAN TERBENTUKNYA INTEGRASI SOSIAL

Oetami Dewi

Abstract. When I start to write this article, I believed that society could be existed while every actors has their relation with others actors, since this happened we could say that the society give many interaction, consensus among the others. Like what Karl Marx, Weber, Durkheim pointed in their research in many areas, I just want to point that we can't avoid the conflict in every situation as conflict itselfs bring many consensus among other actors. Functional Structural also said that in society it seems that conflict as an enemy, but in fact it's not appear as to clear like conflict describe the situation. Regarding this article, I would like to persue the readers to know deeply about what is society, conflict and the reason why in every society has appeared conflict and why we need social integration.

Key word : Social integration, conflict, society.

I. PENDAHULUAN

Awal dari tulisan ini karena kegelisahan saya akan banyaknya konflik dan masalah yang muncul akhir-akhir ini. Mungkin kita perlu menyadari bahwa sebagai bangsa yang cinta damai ada baiknya kita memahami bagaimana terbentuknya integrasi sosial. Ketiadaan integrasi sosial, paling tidak hingga tingkat atau level tertentu, sama saja dengan ketiadaan masyarakat (*society*).

Dalam tulisan ini saya akan memaparkan masalah di atas menurut pandangan tokoh sosiologi, yaitu Karl Marx, Max Weber, dan Durkheim.

Karl Marx

Marx berpendapat, bahwa persoalan yang paling mendasar dalam masyarakat adalah masalah produksi. Ini terjadi sebagai akibat dari kenyataan, bahwa hal yang paling pokok bagi kehidupan manusia itu

adalah soal makan, minum, dan pemenuhan kebutuhan pokok lainnya. Semua itu akan bisa terpenuhi melalui proses produksi. Dalam proses produksi ini, mau tidak mau akan terjadi persaingan dalam pemanfaatan sumberdaya alam yang penting dan terbatas. Akibatnya, terjadilah konflik sosial dimana Marx sangat menekankan masalah konflik sosial ini dalam teorinya.

Dalam pandangan Marx, masyarakat kapitalis itu terdiri atas dua kelas sosial utama. Dasar dari kelas sosial ini adalah hubungan terhadap alat produksi (*relation to the means of production*). Dengan demikian, maka pada masyarakat kapitalis kedua kelas sosial yang utama atau dominan itu adalah kelas pemilik alat produksi (kapitalis) dan kelas buruh (proletar). Kedua kelas ini selalu mempunyai kepentingan (*class interest*) yang berlawanan (*antagonistic*), yang menyebabkan terjadinya konflik. Kelas kapitalis ingin tetap menguasai sumberdaya, sedangkan kelas

buruh tidak menguasai sumberdaya dan ingin merebut sumberdaya tersebut.

Berdasarkan uraian singkat di atas, maka secara implisit Marx berpendapat bahwa dalam masyarakat kapitalis, integrasi terjadi karena adanya penggunaan kekuasaan (*power, force*) oleh kelas dominan atau kelas kapitalis terhadap kelas buruh. Kelas kapitalis dapat melakukan penindasan dan eksploitasi terhadap kelas buruh. Sementara itu, negara (*state*), dipandang oleh Marx tidak lebih dari alat kaum kapitalis saja untuk melegitimasi posisi mereka saja. Karena itu, bagi Marx masyarakat itu bersifat dinamis dan akan mengalami perubahan atau revolusi, sehingga pada akhirnya mencapai tahap yang stabil yakni masyarakat komunis. Karena kepemilikan dipandang sebagai dasar kelas sosial, maka bagi Marx penghapusan kepemilikan pribadi merupakan syarat bagi terciptanya masyarakat yang ideal.

Pada masyarakat komunis ini tidak lagi berdasarkan kekuasaan atau *power*, melainkan berdasarkan interaksi sesama manusia yang sama (*equal*), yang saling menghormati dan mengasihi satu sama lainnya. Negara hanya diperlukan untuk kegiatan administrasi belaka.

Max Weber

Pandangan Weber tentang integrasi sosial nampaknya cukup rumit. Salah satu unsur yang secara implisit dianggap penting oleh Weber adalah soal legitimasi. Legitimasi, misalnya, dipandang Weber sangat penting dalam menciptakan keharmonisan sosial. Jika pihak yang dikuasai (*subordinate*) menarik (*withdraw*) legitimasinya terhadap penguasa, maka cenderung akan terjadi konflik sosial. Sementara itu, penarikan legitimasi itu sendiri berkaitan pula dengan berbagai masalah lainnya, seperti kesenjangan

(dalam hal ekonomi, politik, dan sosial atau *wealth, power, and prestige*), sulitnya mobilitas sosial, dan tertumpuk atau terkonsentrasinya ketiga *rewards* itu (ekonomi, kekuasaan dan sosial) pada orang atau kelompok yang sama.

Legitimasi ini juga berkaitan dengan masalah penggunaan kekuasaan. Kekuasaan yang dianggap sah (*legitimate*) disebut sebagai otoritas (*authority*). Adanya otoritas ini sangat penting dalam mewujudkan integrasi sosial, termasuk dalam organisasi atau birokrasi. Dalam hal ini, pihak yang dikuasai merasa “wajar” atau sah saja penggunaan kekuasaan itu oleh si penguasa. Oleh sebab itu, mereka dapat menerima dan memelihara sistem sosial dan masyarakat yang ada. Dalam kaitan dengan otoritas ini, Weber membedakan antara kekuasaan (otoritas) tradisional, karismatik, dan birokratik.

Di lain pihak, Weber sebenarnya juga menekankan pentingnya tindakan sosial yang dapat pula diartikan sebagai interaksi sosial. Dalam tindakan sosial ini, makna subjektif (*subjective understanding atau meaning*) dari masing-masing individu yang berinteraksi itu sangat penting. Tindakan sosial yang didasarkan pada kepentingan (*instrumental atau means/ends rationality*), misalnya, akan menghasilkan kelompok sosial yang ia sebut sebagai asosiasi, sedangkan tindakan sosial yang berdasarkan nilai-nilai tradisional akan menghasilkan kelompok “komunal”. Bagi Weber, masyarakat kapitalis atau masyarakat modern yang ditandai oleh dominannya *means/ends rationality*, akan sangat didominasi oleh birokrasi.

Emile Durkheim

Durkheim sangat menekankan peranan solidaritas bagi keberlangsungan suatu masyarakat atau integrasi sosial. Bagi Durkheim, masyarakat tradisional diikat

oleh solidaritas sosial yang disebut solidaritas mekanis (*mechanical solidarity*), sedangkan masyarakat modern diikat oleh solidaritas sosial organis (*organic solidarity*).

Bagi Durkheim, agar sebuah masyarakat bisa tetap eksis, maka harus ada struktur atau institusi tertentu yang berfungsi untuk menjaga solidaritas atau integrasi sosial itu. Dalam masyarakat tradisional, solidaritas sosial itu terjadi atas dasar kesamaan nilai-nilai dasar yang bersifat primordial, seperti kesamaan suku, agama, dan budaya. Kesamaan inilah yang mengikat setiap anggota kelompok secara otomatis (mekanis). Sementara itu, pada masyarakat modern dimana telah terjadi diferensiasi atau *division of labor* yang rumit, maka solidaritas itu terbentuk karena masing-masing unit atau individu itu saling membutuhkan satu dengan yang lain.

Durkheim menekankan pentingnya sistem nilai seperti agama, norma, dan moral bagi integrasi sosial ini. Di sisi lain, kontrol sosial (*punishment*, misalnya), juga sangat diperlukan agar tercipta solidaritas kelompok dan selanjutnya integrasi sosial. Disinilah perlunya sistem hukum. Durkheim melihat, bahwa sistem hukum itu merupakan refleksi dari tipe solidaritas; hukum represif: solidaritas mekanik; hukum restitutif: solidaritas organik.

II. KONSEP MASYARAKAT

Fungsionalisme Struktural

Paradigma ini memandang masyarakat merupakan suatu sistem yang terdiri atas unit atau bagian yang saling terkait dan tergantung satu sama lain. Selanjutnya, *fungsionalisme struktural* memandang, bahwa masyarakat itu hanya mungkin ada dan berlanjut apabila ada struktur atau institusi tertentu dalam masyarakat yang berfungsi untuk memenuhi “needs” dari suatu

masyarakat itu. Dalam pandangan Parsons, misalnya, ada empat masalah atau “needs” masyarakat (maupun sistem yang lebih kecil) yang harus dipenuhi agar masyarakat tersebut bisa eksis. Keempat “needs” tersebut adalah *adaptation* (A), *goal attainment* (G), *Integrasi* (I), dan *Latency* (L). Untuk suatu masyarakat yang makro (negara), misalnya, fungsi A dipenuhi oleh institusi ekonomi, fungsi G oleh pemerintah/politik, fungsi I oleh sistem hukum, dan fungsi L oleh keluarga, pendidikan, dan agama. Pandangan Parson ini mempunyai akar dari para tokoh fungsionalisme klasik khususnya Spencer dan Malinowski. Apabila seluruh komponen AGIL ini berjalan dengan baik, maka akan tercipta keseimbangan sosial (*social equilibrium*), yang sama saja dengan integrasi sosial yang harmonis.

Dalam paradigma ini pula, norma, nilai-nilai, dan konsensus dipandang sangat penting bagi keberlangsungan suatu masyarakat. Oleh sebab itu, masalah sosialisasi, internalisasi, dan kontrol sosial menjadi krusial pula bagi eksistensi dan keberlanjutan masyarakat.

Pandangan Konflik

Secara umum teori konflik memandang masyarakat itu merupakan arena perjuangan. Setiap orang dan kelompok mempunyai *interest* dan berupaya mewujudkannya. Karena itu, konflik akan selalu ada dalam masyarakat. Selanjutnya, secara umum dapat dikatakan bahwa teori konflik menekankan peranan kekuasaan (*power*) dalam menciptakan integrasi sosial, atau yang memungkinkan masyarakat itu tetap ada. Oleh sebab itu, dalam pandangan teori konflik, integrasi sosial itu bersifat temporer atau sementara, dimana kelompok yang dominan berhasil mempertahankan kekuasaannya dan keberlangsungan masyarakat yang ada. Setiap waktu, kesatuan ini terancam dan bisa

runtuh manakala kelompok kekuatan yang tertindas berhasil menghimpun kekuatan dan melawan kelompok atau kelas yang dominan.

Dalam teori konflik, ide-ide atau ideologi dan norma dipandang sebagai alat (*weapon*) kaum penguasa (*dominant class*) untuk memperjuangkan kepentingan mereka sendiri atau sistem sosial yang timpang (*unequal*) itu. Di sini kita mengenal jargon-jargon seperti "*hegemony*", dan "*ruling idea is the idea of the ruling class*".

Pertukaran Sosial

Paling mendasar dari teori ini, bahwa masyarakat ada karena terjadi pertukaran sosial antara berbagai aktor dalam masyarakat. Tanpa adanya pertukaran sosial, maka integrasi sosial atau masyarakat tidak akan bisa eksis. Malinowski, misalnya menunjukkan bahwa ritual yang disebut "*kula ring*", yakni pertukaran gelang dan kalung, berfungsi untuk menciptakan dan memelihara solidaritas dan integrasi sosial pada masyarakat kepulauan yang ia teliti.

Pertukaran itu sendiri terjadi karena adanya apa yang disebut Blau sebagai "*social attraction*". Setiap individu mempunyai *resource* tertentu dan saling membutuhkan satu dengan yang lain. Oleh sebab itu, maka terjadilah pertukaran sosial antar berbagai individu tersebut. Pertukaran juga terjadi pada tingkat yang lebih makro, baik antar kelompok maupun institusi. Pertukaran sosial ini menciptakan jaringan sosial (*social network*) bahkan merupakan cikal bakal munculnya norma, struktur atau institusi itu sendiri. Adapun *rewards* yang bisa diperoleh dari pertukaran ini bisa berupa material, tapi bisa juga non-material seperti "pertemanan", *respect*, *esteem*, cinta, dan sebagainya.

Interaksionisme Simbolik

Paradigma ini sangat menekankan interaksi antar individu atau aktor sebagai proses paling mendasar yang membentuk suatu masyarakat. Dengan kata lain, masyarakat ada, karena ada interaksi simbolik yang terjadi antar individu manusia. Tanpa interaksi sosial, mustahil "*society*" bisa eksis dan berkelanjutan. Sementara itu, mereka menekankan, bahwa interaksi itu sendiri terjadi dengan menggunakan simbol-simbol, seperti bahasa, gerak-gerik tubuh, gambar, dan sebagainya. Pendeknya, interaksi sosial terjadi dengan pemakaian simbol atau tanda-tanda (oleh sebab itu disebut interaksi simbolik).

Penggunaan simbol dalam berinteraksi ini memungkinkan para aktor itu mempunyai "*common understanding*" atau "definisi situasi" yang kurang lebih sama. Kesamaan "cara pandang" ini sangat penting dalam menciptakan solidaritas dan integrasi sosial.

Dalam berinteraksi ini, mereka menekankan pentingnya *role taking*. Interaksi sosial akan berjalan lancar manakala masing-masing individu yang berinteraksi itu dapat melakukan *role taking*, yang mengandung pengertian antara lain menempatkan diri pada posisi orang lain, atau memahami dari kacamata orang lain. Dengan kemampuan *role taking* ini maka setiap individu dapat melakukan tindakan yang cocok (*proper*), sehingga interaksi berjalan dengan baik.

III. PENUTUP

Konsep dasar masyarakat dan integrasi sosial tidak bisa dilepaskan dari perjalanan terbentuknya masyarakat itu sendiri. Konflik tidak harus selalu dimaknai

buruk tapi sebaiknya dipakai sebagai penyeimbang didalam memaknai suatu keadaan. Tidak ada sesuatu di dunia ini yang benar-benar harmonis dan tanpa konflik, kecuali masyarakat itu sendiri sudah tidak ada lagi. Memandang dari pengalaman dan tulisan yang ada tampaknya ke tiga tokoh besar sosiologi ini berusaha memaknai masyarakat sebagai suatu kehidupan dan keadaan yang dinamis, wajar jika Karl Marx gelisah dengan persoalan mendasar dalam masyarakat yakni faktor produksi dan hubungan didalamnya, serta terbentuknya kelas dalam masyarakat, dan melihat bahwa kepemilikan dipandang sebagai dasar kelas sosial. Max Weber dalam tindakan sosial memaknai *subjective understanding* atau *meaning* dari masing-masing individu yang berinteraksi itu sangat penting karena tindakan sosial yang didasarkan pada kepentingan (*instrumental* atau *means/ends rationality*), hanya akan menghasilkan kelompok sosial yang ia sebut sebagai asosiasi, sementara tindakan sosial yang berdasarkan nilai-nilai tradisional akan menghasilkan kelompok "komunal". Dan menurutnya masyarakat kapitalis atau masyarakat modern yang ditandai oleh dominannya *means/ends rationality*, akan sangat didominasi oleh birokrasi. Sementara Durkheim sangat menekankan peranan solidaritas bagi keberlangsungan suatu masyarakat atau integrasi sosial. Dengan memaknai pandangan ke tiga tokoh besar tersebut kita bisa melihat bahwa terbentuknya dan hancurnya masyarakat bisa dimaknai melalui pandangan-pandangan tersebut, meskipun untuk kondisi saat ini dimungkinkan sekali sudah mulai berkurang relevansinya, tapi paling tidak pemaknaan sebagai awal dari masyarakat itu sendiri bisa dipakai sebagai pisau untuk analisa keadaan sekarang yang serba dibalut romantisme keharmonisan itu sendiri.

DAFTAR PUSTAKA

- Turner, Jonathan H, 1998, *The Structure of Sociological Theory*. United States of America: Wadsworth Publishing Company.
- Farganis, James, 2004, *Reading in Social Theory, The Classic Traditional to Post-Modernism*. New York: McGraw-Hill.
- Mohan, Giles, Ed Brown, Bob Milward And Alfred B.Zak-Williams, 2000, *Structural Adjusment, Theory, Practice And Impacts*. London: NewYork, Routledge.

DR. Oetami Dewi, M.Si. Doktor Sosiologi dari Universitas Indonesia. Bekerja pada Biro Perencanaan, Departemen Sosial RI. Aktif mengikuti dan menjadi pembicara seminar/diskusi ilmiah di dalam maupun di luar negeri tentang pembangunan kesejahteraan sosial.